

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

**Balai Besar Pengkajian dan  
Pengembangan Teknologi Pertanian**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

***Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)***

**Jawa Barat**

**Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928**

**E-mail:bbp2tp@litbang.deptan.go.id**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



31 Desember 2020

Keala Balai Besar Pengkajian,

Dr. Ir. Muhammad Taufik Ratule, M.Si  
NIP. 19680918 199303 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.5. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Gedung dan Bangunan

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Lain-lain

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
    - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2020

— Kepala Balai Besar Pengkajian,



Dr. Ir. Muhammad Taufik Ratule, M.Si

NIP. 19680918 199303 1 002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp475.572.747,00 atau mencapai 404,27% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp117.637.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp20.541.596.395,00 atau mencapai 97,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.018.710.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.346.664.691,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp63.410.900,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.169.863.591,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp113.390.200,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp53.820.333,00 dan Rp18.292.844.358,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.366.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.813.575.075,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23.751.209.075,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp562.761.337,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23.188.447.738,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp21.428.464.712,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23.188.447.738,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-13.196.264,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.066.023.648,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp18.292.844.358,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	117.637.000,00	475.572.747,00	404,27	125.126.349,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>117.637.000,00</b>	<b>475.572.747,00</b>	<b>404,27</b>	<b>125.126.349,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	8.553.542.000,00	8.238.329.393,00	96,31	8.351.469.298,00
Belanja Barang	B.4.	11.810.196.000,00	11.676.377.002,00	98,87	74.732.009.063,00
Belanja Modal	B.5.	654.972.000,00	626.890.000,00	95,71	1.508.668.345,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>21.018.710.000,00</b>	<b>20.541.596.395,00</b>	<b>97,73</b>	<b>84.592.146.706,00</b>



## II. NERACA

**BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	0,00	271.500.000,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.2.	0,00	2.833.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.	36.960.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.4.	-184.800,00	0,00
Persediaan	C.1.5.	26.635.700,00	1.952.246.719,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>63.410.900,00</b>	<b>2.226.579.719,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	14.009.250.416,00	13.903.587.216,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	16.204.188.515,00	16.003.083.900,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	1.544.823.300,00	1.544.823.300,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	442.324.564,00	443.023.459,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-14.030.723.204,00	-12.652.982.549,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>18.169.863.591,00</b>	<b>19.241.535.326,00</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	113.960.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	-569.800,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>113.390.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.4.1.	302.268.800,00	45.200.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-302.268.800,00	-45.200.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>18.346.664.691,00</b>	<b>21.468.115.045,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.	53.820.333,00	39.650.333,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>53.820.333,00</b>	<b>39.650.333,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>53.820.333,00</b>	<b>39.650.333,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	18.292.844.358,00	21.428.464.712,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>18.292.844.358,00</b>	<b>21.428.464.712,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>18.346.664.691,00</b>	<b>21.468.115.045,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	62.366.000,00	65.791.817,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>62.366.000,00</b>	<b>65.791.817,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	8.238.329.393,00	8.351.469.298,00
Beban Persediaan	D.3.	1.444.663.861,00	2.082.668.510,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5.917.188.257,00	13.876.703.142,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.605.895.950,00	1.715.139.483,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.741.595.774,00	8.777.426.014,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.908.281.769,00	36.492.378.033,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	271.500.000,00	9.786.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.685.365.471,00	1.898.550.798,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	754.600,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>23.813.575.075,00</b>	<b>82.980.335.278,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-23.751.209.075,00</b>	<b>-82.914.543.461,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0,00	21.555.999,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0,00	13.771.412,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	584.288.837,00	999.185.410,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	21.527.500,00	1.251.575.072,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>562.761.337,00</b>	<b>-244.605.075,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-23.188.447.738,00</b>	<b>-83.159.148.536,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	21.428.464.712,00	18.727.722.380,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-23.188.447.738,00	-83.159.148.536,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	-13.196.264,00	1.471.670.511,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	409.069.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-13.196.264,00	1.062.601.511,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	20.066.023.648,00	84.388.220.357,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5.</b>	<b>18.292.844.358,00</b>	<b>21.428.464.712,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

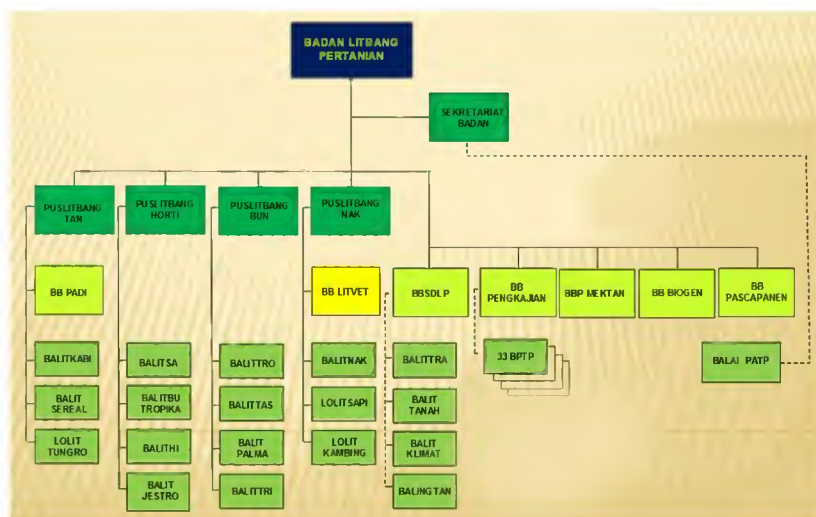
### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian atau lebih dikenal sebagai BB Pengkajian merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor No.39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP.

Selain tugas utama tersebut, Kepala Badan Litbang Pertanian juga memberikan mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang Pertanian. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan oleh BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya.



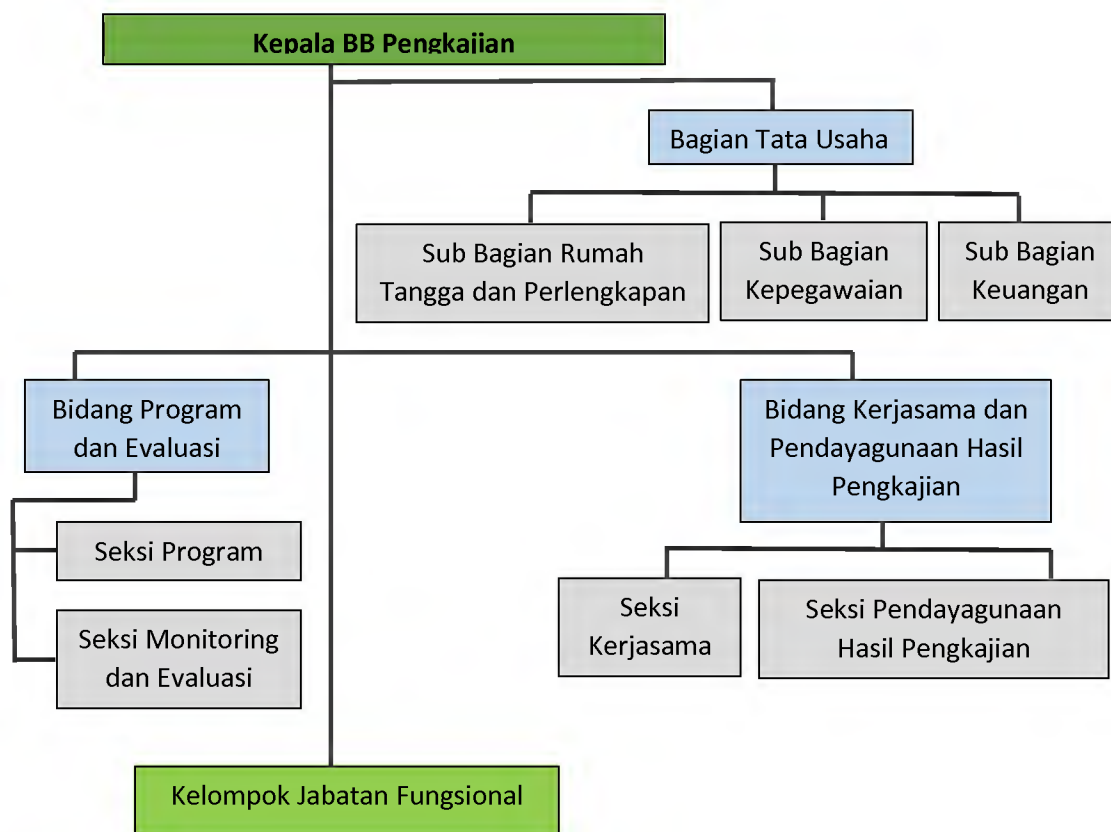
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

## STRUKTUR ORGANISASI & SDM

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) adalah Unit Kerja yang mengkoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbesar, yaitu 33 UPT (BPTP). BB Pengkajian harus bertindak sebagai koordinator BPTP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sekaligus sebagai integrator program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan (litkajibangrap) mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BB Pengkajian, tugas utama BB Pengkajian adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BB Pengkajian menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (b) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan, (e) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional, dan (f) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar. Disamping melaksanakan tugas pokok seperti yang diuraikan di atas, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 161/2006, BB Pengkajian diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP, serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian. Pemberian mandat BB Pengkajian untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya. Selain itu, BB Pengkajian juga berperan dalam pembinaan pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier struktural dan fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan dalam publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian yang dihasilkan BPTP.

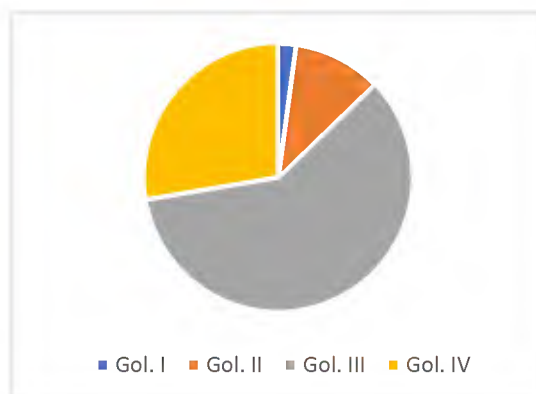
Susunan Organisasi BB Pengkajian antara lain : Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Pengkajian membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan. Kepala Bidang Program dan Evaluasi membawahi Kasie Program dan Kasie Monitoring dan Evaluasi. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian membawahi Kasie Kerjasama dan Kasie Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung dibawah Kepala BB Pengkajian.



Gambar 2. Bagan struktur organisasi BB Pengkajian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.39/Permentan/OT.140/3/2013

## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2020 sebanyak 94 orang terdiri dari 26 orang golongan IV, 56 orang golongan III, 10 orang golongan II dan 2 orang golongan I dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :



Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
<b>1. Peneliti</b>	<b>33</b>
- Peneliti Utama	7
- Peneliti Madya	9
- Peneliti Muda	12
- Peneliti Pertama	5
<b>2. Penyuluh</b>	<b>12</b>
- Penyuluh Utama	1
- Penyuluh Madya	2
- Penyuluh Muda	6
- Penyuluh Pertama	1
- Calon Penyuluh	2
<b>3. Analis Kepegawaian</b>	<b>5</b>
- Analis Kepegawaian Madya	1
- Analis Kepegawaian Muda	3
- Analis Kepegawaian Terampil	1
<b>4. Analis Pengelolaan Keuangan</b>	<b>2</b>
- Analis Pengelolaan Keuangan Muda	2
<b>5. Analis Perencana</b>	<b>3</b>
- Analis Perencana Madya	1
- Analis Perencana Muda	2
<b>6. Pranata Humas</b>	<b>1</b>
- Pranata Humas Muda	1
<b>7. Pustakawan</b>	<b>1</b>
- Pustakawan Mahir	1
<b>8. Calon Pranata Komputer</b>	<b>1</b>
- Cln Pranata Komputer pertama	1
<b>9. Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>37</b>

Komposisi jabatan fungsional di BB Pengkajian didominasi oleh jabatan fungsional yaitu 58 orang dan 37 orang fungsional umum yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama penelitian dan pengkajian, diseminasi, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.



**VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN SASARAN  
BB PENGKAJIAN**

BB Pengkajian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon II Badan Litbang Pertanian, yang secara hirarkis merupakan *Bussines Unit* Balitbangtan. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BB Pengkajian menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Badan Litbang Pertanian, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program Badan Litbang Misi Balitbangtan 2020 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, termasuk BB Pengkajian. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi dan misi BB Pengkajian adalah:

**Visi Balai Besar Pengkajian :**

“Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

**Misi Balai Besar Pengkajian :**

1. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik wilayah sesuai dengan kebutuhan pengguna
2. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian
3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
4. Mengembangkan SDM yang profesional dan mandiri

**Tugas Pokok Balai Besar Pengkajian :** Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

**Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengkajian :**

1. Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

**Fungsi Balai Besar Pengkajian :**

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan
4. Pelaksanaan analisis kebijakan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
6. Pelaksanaan pengembangan sistim informasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian



7. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya realokasi anggaran atas belanja yang tidak prioritas ke belanja dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	59.750.000,00	59.750.000,00
Pendapatan Lain-lain	57.887.000,00	57.887.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>117.637.000,00</b>	<b>117.637.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.457.496.000,00	8.457.496.000,00
Belanja Lembur	96.046.000,00	96.046.000,00
Belanja Barang Operasional	2.300.999.000,00	2.537.381.000,00
Belanja Barang Non Operasional	16.095.140.000,00	2.291.187.000,00
Belanja Barang Persediaan	4.195.993.000,00	1.472.064.000,00
Belanja Jasa	5.269.000.000,00	1.201.550.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.769.025.000,00	1.555.330.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.847.500.000,00	2.752.684.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	93.973.058.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.307.193.000,00	433.272.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.463.966.000,00	221.700.000,00
Belanja Modal Lainnya	58.800.000,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>148.834.216.000,00</b>	<b>21.018.710.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp475.572.747,00 atau mencapai 404,27% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp117.637.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	51.000.000,00	50.994.000,00	99.98
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	8.750.000,00	28.375.000,00	324.28
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	3.080.000,00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	68.126.239	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	57.887.000,00	306.445.228,00	529.38
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	18.552.280,00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>117.637.000,00</b>	<b>475.572.747,00</b>	<b>404,27</b>

Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2020 sebesar 404.27 % dari estimasi pendapatan, terdiri dari :

1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp50.994.000,00 yaitu berupa ATM BNI selama 3 tahun mulai dari 1 Nopember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2022 sesuai dengan kontrak nomor BGR-01/077/PKS/2019 sebesar Rp50.994.000,00;
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp28.375.000,00 berasal dari pendapatan sewa rumah tamu (*guest house*);
3. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.080.000,00 berasal dari setoran tuntutan ganti rugi An. Sabilal Fahri sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor R.0234/PW.130/G.4/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan surat pernyataan kesanggupan akan mencicil selama 50 bulan sebesar Rp3.080.000,00 per bulan.
4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp68.126.239,00 berupa pengembalian atas kekurangan gaji Rp39,00, pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An Titim Rahmawati Rp21.000.000,00, pengembalian atas uang lembur Rp17.096.200,00, pengembalian pembayaran atas tunjangan fungsional An. Anggita Rp18.480.000,00 dan pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An. Sigid Handoko Rp11.550.0000,00;
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp306.445.228,00 yaitu pengembalian belanja bahan Rp12.105.000; Belanja barang persediaan Rp40.022.700,00; belanja jasa profesi Rp29.240.000,00; belanja bahan pendukung lainnya Rp35.012.000,00; belanja perjalanan dinas Rp26.459.500,00; belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp163.606.028,00.
6. Penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar RP18.552.280,00 berupa pengembalian pengadaan buku perpustakaan dan pengadaan renovasi gedung B perpustakaan dan rumah genset TA 2019

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 280,07% dibandingkan TA 2019 karena adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu ATM BNI selama 3 tahun dan adanya pengembalian belanja TAYL sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Audit Nomor R.0234/PW.130/G.4/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	3.080.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	79.369.000,00	106.610.149,00	-25,55
Pendapatan Lain-lain	393.123.747,00	18.516.200,00	2.023,13
<b>Jumlah</b>	<b>475.572.747,00</b>	<b>125.126.349,00</b>	<b>280,07</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp20.541.596.395,00 atau 97,73% dari anggaran belanja sebesar Rp21.018.710.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	8.553.542.000,00	8.269.700.326,00	96,68
Belanja Barang	11.810.196.000,00	11.682.054.592,00	98,92
Belanja Modal	654.972.000,00	626.890.000,00	95,71
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>21.018.710.000,00</b>	<b>20.578.644.918,00</b>	<b>97,91</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-37.048.523,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>21.018.710.000,00</b>	<b>20.541.596.395,00</b>	<b>97,73</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -75,72% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar 1.35 % disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai karena adanya 2 orang pegawai yang memasuki masa purna bakti;

2. Penurunan realisasi belanja barang sebesar 84.38 % disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan dihentikan dan atau dikurangi kegiatannya untuk mengurangi dampak penularan dan penanggulangan covid 19;
3. Penurunan realisasi belanja modal sebesar 58.45 % disebabkan adanya realokasi anggaran untuk penanggulangan covid 19.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	8.238.329.393,00	8.351.469.298,00	-1,35
Belanja Barang	11.676.377.002,00	74.732.009.063,00	-84,38
Belanja Modal	626.890.000,00	1.508.668.345,00	-58,45
<b>Total Belanja</b>	<b>20.541.596.395,00</b>	<b>84.592.146.706,00</b>	<b>-75,72</b>

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja  
TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 31 Desember 2020	Anggaran 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	8.553.542.000,00	8.411.116.000,00	-1,69
Belanja Barang	11.810.196.000,00	84.956.413.000,00	-86,10
Belanja Modal	654.972.000,00	1.593.747.000,00	-58,90
<b>Total Belanja</b>	<b>21.018.710.000,00</b>	<b>94.961.276.000,00</b>	<b>-77,87</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.238.329.393,00 dan Rp8.351.469.298,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -1,35% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan jumlah pegawai karena adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti sebanyak 2 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.195.955.326,00	8.304.837.638,00	-1,31
Belanja Lembur	73.745.000,00	59.084.000,00	24,81
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.269.700.326,00</b>	<b>8.363.921.638,00</b>	<b>-1,13</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-31.370.933,00</b>	<b>-12.452.340,00</b>	<b>151,93</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.238.329.393,00</b>	<b>8.351.469.298,00</b>	<b>-1,35</b>

Pengembalian belanja pegawai terdiri dari pengembalian atas pembulatan gaji, pengembalian tunjangan fungsional, pengembalian gaji pokok dan tunjangan umum.

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.676.377.002,00 dan Rp74.732.009.063,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -84,38% dari TA 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan dihentikan dan direlokasi anggarannya untuk mengurangi dampak penularan covid 19 dan penanggulangan pandemi covid 19. Penurunan belanja barang disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja barang operasional sebesar 20.98% meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak. Adanya tambahan pengeluaran pada keperluan sehari-hari perkantoran dan penambah daya tahan tubuh sebagai dampak pandemi Covid 19 yaitu pembelian hand sanitizer, masker dan penambah daya tahan tubuh berupa vitamin, susu dan makanan penunjang kesehatan untuk seluruh pegawai serta pengadaan desinfektan gate dan biaya komunikasi bagi pejabat struktural.
2. Penurunan belanja barang non operasional sebesar 75.79 % meliputi belanja bahan pendukung kegiatan dan upah tenaga kerja lapang di kegiatan KRPL dan TSP disebabkan terhentinya beberapa kegiatan akibat dampak dari pandemi Covid 19.
3. Penurunan belanja barang persediaan sebesar 29.83 % yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku dikarenakan pengadaan untuk belanja barang persediaan dilakukan di awal kegiatan untuk mendukung operasional perkantoran selama 1 tahun karena adanya pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan dihentikan atau dikurangi kegiatannya.
4. Penurunan belanja jasa sebesar 52.01 % meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa. Penurunan belanja jasa terutama jasa profesi disebabkan terhentinya beberapa kegiatan yang melibatkan jasa profesi karena dampak dari pandemi Covid 19. Realisasi belanja jasa pada tahun anggaran 2020 adalah belanja jasa untuk test Kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemic Covid 19 yaitu Rapid Test dan Swab PCR kepada seluruh pegawai serta penyemprotan desinfektan dan biaya jasa profesi yang dilakukan secara online.
5. Penurunan belanja pemeliharaan sebesar 6.98 % disebabkan karena fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan

untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan

6. Penurunan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 68.74 % meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota karena terhentinya beberapa kegiatan dan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah sehingga tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas keluar kota untuk mengurangi dampak penularan Covid 19.
7. Penurunan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar 100 % disebabkan pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.489.156.571,00	2.057.556.000,00	20,98
Belanja Barang Non Operasional	2.281.801.250,00	9.424.022.188,00	-75,79
Belanja Barang Persediaan	1.462.785.521,00	2.084.645.160,00	-29,83
Belanja Jasa	1.149.631.526,00	2.395.409.954,00	-52,01
Belanja Pemeliharaan	1.554.838.950,00	1.671.573.483,00	-6,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.743.840.774,00	8.778.011.014,00	-68,74
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	48.324.661.264,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>11.682.054.592,00</b>	<b>74.735.879.063,00</b>	<b>-84,37</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>-5.677.590,00</b>	<b>-3.870.000,00</b>	<b>46,71</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.676.377.002,00</b>	<b>74.732.009.063,00</b>	<b>-84,38</b>

Terdapat pengembalian belanja barang di semester II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.677.590,00 yaitu terdiri dari :

1. Pengembalian belanja barang PPNPN An. Yusti sebesar Rp2.100.000,00 dikarenakan lebih bayar pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020
2. Pengembalian belanja perjalanan dinas An. Dr. Sigid Handoko, SP, MSi sebesar Rp120.000,00 dan Rp125.000,00
3. Pengembalian belanja pemeliharaan dan mesin sebesar Rp31.500,00 karena kelebihan pembayaran pajak kendaraan roda dua F 4966 A
4. Pengembalian belanja perjalanan dinas An Prof. Rubiyo Rp275.000,00
5. Pengembalian kelebihan pembayaran internet bulan April dan Mei 2020 sebesar Rp1.301.090,00
6. Pengembalian belanja perjalanan dinas An. Dr. Setiasih sebesar Rp75.000,00
7. Pengembalian uang perjalanan dinas An. Roslita sebesar Rp445.000,00



8. Pengembalian belanja perjalanan dinas An. Elya Nurwulan dkk sebesar Rp565.000,00
9. Pengembalian transport lokal An. Rio dan Iman R sebesar Rp440.000,00
10. Pengembalian belanja cashback atas pembelian tiket pesawat menggunakan KKP sebesar Rp200.000,00

## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp626.890.000,00 dan Rp1.508.668.345,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -58,45% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain adanya realokasi anggaran belanja modal untuk penanganan Covid 19

### Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.932.000,00	972.727.704,00	-58,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.958.000,00	486.824.800,00	-55,02
Belanja Modal Lainnya	0,00	49.115.841,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>626.890.000,00</b>	<b>1.508.668.345,00</b>	<b>-58,45</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>626.890.000,00</b>	<b>1.508.668.345,00</b>	<b>-58,45</b>

### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp407.932.000,00 dan Rp972.727.704,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -58,06% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain adanya realokasi anggaran untuk penanganan covid 19.

### Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.932.000,00	972.727.704,00	-58,06
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>407.932.000,00</b>	<b>972.727.704,00</b>	<b>-58,06</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>407.932.000,00</b>	<b>972.727.704,00</b>	<b>-58,06</b>

Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp407.932.000,00 terdiri dar :

- a. Pembelian lemari besi sebanyak 10 buah dengan nilai Rp39.000.000,00
- b. Pembelian kasur/springbed sebanyak 1 buah dengan nilai Rp25.000.000,00
- c. Pembelian kamera digital sebanyak 1 buah dengan nilai Rp20.000.000,00
- d. Pembelian PC Unit sebanyak 8 buah dengan nilai Rp219.600.000,00
- e. Pembelian Laptop sebanyak 4 buah dengan nilai Rp87.232.000,00
- f. Pembelian scanner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp13.800.000,00
- g. Pembelian kursi dorong sebanyak 1 buah dengan nilai Rp3.300.000,00

#### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp218.958.000,00 dan Rp486.824.800,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -55,02% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya realokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk penanganan covid 19

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.958.000,00	486.824.800,00	-55,02
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>218.958.000,00</b>	<b>486.824.800,00</b>	<b>-55,02</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>218.958.000,00</b>	<b>486.824.800,00</b>	<b>-55,02</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp271.500.000,00.

#### Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Penjelasan 1	0,00
Penjelasan 2	0,00
dst...	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### C.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.833.000,00.

#### Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Penjelasan 1	0,00
Penjelasan 2	0,00
dst...	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.960.000,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

#### Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020

No	Nama Debitur	31 Desember 2020
1.	Sabilal Fahri, SP.i, M.Si	36.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.960.000,00</b>



Saldo bagian lancar merupakan biaya Pendidikan tugas belajar yang tidak selesai dalam batas waktu yang ditetapkan yang harus disetor ke kas negara pada tahun 2021

#### C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-184.800,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	36.960.000,00	0.5%	184.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.960.000,00</b>		<b>184.800,00</b>

#### C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp26.635.700,00 dan Rp1.952.246.719,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	18.235.700,00	42.332.950,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	400.000,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	246.102.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	30.800.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	69.496.400,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	1.561.883.369,00

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bahan Baku	0,00	1.232.000,00
Persediaan Lainnya	8.400.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.635.700,00</b>	<b>1.952.246.719,00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.009.250.416,00 dan Rp13.903.587.216,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>13.903.587.216,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	407.932.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-302.268.800,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>14.009.250.416,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-11.869.315.721,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>2.139.934.695,00</b>

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin adalah reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dikarenakan kondisi aset rusak berat dan akan dilakukan penghapusan berupa :

- a. Minibus sebanyak 2 unit yaitu Mitsubishi Kuda Rp115.631.000,00 dan Toyota Kijang Rp175.000.000,00
- b. Sepeda motor sebanyak 2 unit yaitu Suzuki A.100 Rp9.275.800,00 dan Suzuki A-100 VR Rp2.362.000,00

Mutasi tambah sebesar Rp407.932.000,00 pada peralatan dan mesin berasal dari pembelian belanja modal peralatan dan mesin dan belum dilakukan penetapan status penggunaan (PSP), yaitu :

- a. Pembelian lemari besi sebanyak 10 buah dengan nilai Rp39.000.000,00
- b. Pembelian kasur/springbed sebanyak 1 buah dengan nilai Rp25.000.000,00
- c. Pembelian kamera digital sebanyak 1 buah dengan nilai Rp20.000.000,00
- d. Pembelian PC Unit sebanyak 8 buah dengan nilai Rp219.600.000,00
- e. Pembelian Laptop sebanyak 4 buah dengan nilai Rp87.232.000,00
- f. Pembelian scanner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp13.800.000,00
- g. Pembelian kursi dorong sebanyak 1 buah dengan nilai Rp3.300.000,00

### C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.204.188.515,00 dan Rp16.003.083.900,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>16.003.083.900,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Melalui KDP	218.958.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-17.853.385,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>16.204.188.515,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1.346.745.268,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>14.857.443.247,00</b>

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa pengembangan melalui KDP berupa gedung garasi/pool semi permanen sebesar Rp218.958.000,00

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa koreksi pencatatan bangunan gedung dan bangunan akibat adanya pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp17.853.385,00 yaitu :

- a. Pengembalian belanja gedung dan bangunan berupa renovasi gedung perpustakaan dan gedung genset TA 2019 sebesar Rp13.431.819,00 disetorkan tanggal 26 Oktober 2020 dengan kode NTPN 576E82G4UKS6F2M4
- b. Pengembalian kelebihan pekerjaan renovasi gedung perpustakaan dan rumah genset sebesar Rp4.421.566,00 disetorkan tanggal 26 Oktober 2020 dengan kode NTPN EEC2D55DE4MB001J

### C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.544.823.300,00 dan Rp1.544.823.300,00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pada tahun 2020 tidak ada belanja modal untuk jalan. Irigasi dan jaringan.

### C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp442.324.564,00 dan Rp443.023.459,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>443.023.459,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-698.895,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>442.324.564,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>442.324.564,00</b>

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa pengembalian belanja modal lainnya berupa buku perpustakaan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp698.895,00 disetorkan tanggal 22 Oktober 2020 dengan kode NTPN 73D992G4UKS1C91C

#### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-14.030.723.204,00 dan Rp-12.652.982.549,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.009.250.416,00	-11.869.315.721,00	2.139.934.695,00
2.	Gedung dan Bangunan	16.204.188.515,00	-1.346.745.268,00	14.857.443.247,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.544.823.300,00	-814.662.215,00	730.161.085,00
4.	Aset Tetap Lainnya	442.324.564,00	0,00	442.324.564,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>32.200.586.795,00</b>	<b>-14.030.723.204,00</b>	<b>18.169.863.591,00</b>

### C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp113.960.000,00 dan Rp0,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si	113.960.000,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>113.960.000,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang jangka Panjang merupakan tagihan ganti rugi atas biaya Pendidikan tugas belajar yang tidak selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan yang harus disetor ke kas negara dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

#### C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-569.800,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	113.960.000,00	0,5%	569.800,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

## C.4. ASET LAINNYA

### C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp302.268.800,00 dan Rp45.200.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>45.200.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	302.268.800,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-45.200.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>302.268.800,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-302.268.800,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>0,00</b>

Mutasi transaksi penambahan adalah berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dikarenakan kondisi aset rusak berat dan akan dilakukan penghapusan berupa :

- Minibus sebanyak 2 unit yaitu Mitsubishi Kuda Rp115.631.000,00 dan Toyota Kijang Rp175.000.000,00
- Sepeda motor sebanyak 2 unit yaitu Suzuki A.100 Rp9.275.800,00 dan Suzuki A-100 VR Rp2.362.000,00

Mutasi transaksi pengurangan adalah penghapusan BMN yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp45.200.000,00 berupa minibus pada bulan Januari 2020.

### C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-302.268.800,00 dan Rp-45.200.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	302.268.800,00	-302.268.800,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>302.268.800,00</b>	<b>-302.268.800,00</b>	<b>0,00</b>

**C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp53.820.333,00 dan Rp39.650.333,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	53.820.333,00	39.650.333,00
<b>Jumlah</b>	<b>53.820.333,00</b>	<b>39.650.333,00</b>

Keseluruhan pendapatan di terima dimuka tersebut bersumber dari jasa sewa ATM BRI sebesar Rp50.979.000,00 sesuai perjanjian pinjam pakai nomor B.239-KC/XIV/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 selama tiga tahun dan sewa ATM BNI sebesar Rp50.994.000,00 sesuai perjanjian pinjam pakai nomor BGR/01/077/PKS/2019 tanggal 17 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan di terima di muka										
		Mulai	Sampai	2019	2020	2021	2022	Total Bulan	per bulan	
			Jumlah Bulan	8	12	12	4	36		
BRI	Rp	50.979.000	01 Mei 2019	30 April 2022	11.328.667	16.993.000	16.993.000	5.664.333	50.979.000	1.416.083
			Jumlah Bulan	2	12	12	10	36		
BNI	Rp	50.994.000	1 Nopember	31 Oktober 2022	Rp 2.833.000	Rp 16.998.000	Rp 16.998.000	Rp 14.165.000	Rp 50.994.000	1.416.500
					Rp 14.161.667	Rp 33.991.000	Rp 33.991.000	Rp 19.829.333		
					Rp 14.161.667	Rp 33.991.000	Rp	53.820.333		

## **C.6. EKUITAS**

### **C.6. Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.292.845.158,00 dan Rp21.428.464.712,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp62.366.000,00 dan Rp65.791.817,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	28.375.000,00	32.350.000,00	-12,29
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	33.991.000,00	33.441.817,00	1,64
<b>Jumlah</b>	<b>62.366.000,00</b>	<b>65.791.817,00</b>	<b>-5,21</b>

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house) sebesar Rp28.375.000,00, sedangkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa ATM BNI dan BRI yang sudah selesai diterima di tahun 2020 sebesar Rp33.991.000,00.

Terjadi selisih pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan di Laporan Realisasi Pendapatan dan Laporan Operasional sebesar Rp17.003.000,00 merupakan jasa yang blm diterima oleh pihak Bank yang berasal dari pendapatan sewa ATM.

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.238.329.393,00 dan Rp8.351.469.298,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.119.620.900,00	5.352.313.142,00	-4,35
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.017,00	69.425,00	-9,23

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	102.631.126,00	107.661.605,00	-4,67
Beban Tunj. Beras PNS	235.220.160,00	247.004.940,00	-4,77
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.330.290.000,00	1.303.930.000,00	2,02
Beban Tunj. PPh PNS	90.087.394,00	96.825.028,00	-6,96
Beban Tunj. Struktural PNS	114.330.000,00	106.555.000,00	7,30
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	364.379.396,00	393.809.158,00	-7,47
Beban Tunjangan Umum PNS	95.799.400,00	106.150.000,00	-9,75
Beban Uang Lembur	73.745.000,00	59.084.000,00	24,81
Beban Uang Makan PNS	712.163.000,00	578.067.000,00	23,20
<b>Jumlah</b>	<b>8.238.329.393,00</b>	<b>8.351.469.298,00</b>	<b>-1,35</b>

Jumlah pegawai pada Balai Besar Pengkajian mengalami penurunan sebesar 1.35 % dikarenakan adanya penurunan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai Balai Besar Pengkajian sebanyak 94 orang dengan jumlah eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 1 orang, jabatan fungsional peneliti 33 orang, penyuluh 12 orang, analis kepegawaian 5 orang, analis pengelolaan keuangan 2 orang, analis perencana 3 orang, pranata humas 1 orang, pustakawan 1 orang, calon pranata komputer 1 orang, dan jabatan fungsional umum 37 orang yang tersebar di bagian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, program dan penganggaran, kerjasama, penelitian dan pengkajian.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.444.663.861,00 dan Rp2.082.668.510,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	1.389.600,00	8.824.000,00	-84,25
Beban Persediaan konsumsi	1.330.498.161,00	2.073.749.510,00	-35,84
Beban persediaan lainnya	112.776.100,00	95.000,00	118.611,68
<b>Jumlah</b>	<b>1.444.663.861,00</b>	<b>2.082.668.510,00</b>	<b>-30,63</b>

Beban Persediaan bahan baku dan beban persediaan konsumsi merupakan alat tulis kantor berupa alat tulis, tinta, penjepit kertas, ordner dan map, cutter, pita mesin tik, alat perekat, stadler, alat pemotong, kertas, amplop, tinta/toner, Flashdisk/USB, lampu listrik, batu baterai dan alat tulis kantor lainnya sebagai bahan pendukung kegiatan. Beban persediaan konsumsi selain pada alat tulis kantor dan computer supplies juga meliputi hand sanitizer, masker, euca roll on, euca inhalant, desinfektan dan euca card. Beban persediaan mengalami penurunan sebesar 30.63 % dibandingkan tahun 2019 karena adanya realokasi anggaran akibat adanya pandemi covid 19.

Terdapat selisih belanja beban persediaan dengan realisasi persediaan berasal dari saldo awal ditambah selisih penyesuaian nilai persediaan dikurangi saldo akhir persediaan.

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.917.188.257,00 dan Rp13.876.703.142,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	653.962.500,00	4.343.350.713,00	-84,94
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.012.548.750,00	2.209.870.350,00	-54,18
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	169.646.980,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144.535.000,00	265.095.000,00	-45,48
Beban Honor Output Kegiatan	615.290.000,00	2.870.801.125,00	-78,57
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	424.361.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	0,00	17.000.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	11.000.000,00	141.823.772,00	-92,24
Beban Jasa Profesi	318.850.000,00	1.623.065.000,00	-80,36
Beban Keperluan Perkantoran	1.884.852.666,00	1.698.722.000,00	10,96
Beban Langganan Air	56.565.000,00	53.851.500,00	5,04
Beban Langganan Listrik	326.091.095,00	347.720.965,00	-6,22
Beban Langganan Telepon	9.464.431,00	27.467.617,00	-65,54
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	246.845.135,00	57.000.000,00	333,06
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39.875.700,00	36.454.000,00	9,39

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Sewa	3.300.000,00	184.481.100,00	-98,21
<b>Jumlah</b>	<b>5.917.188.257,00</b>	<b>13.876.703.142,00</b>	<b>-57,36</b>

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyak dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan sebesar 84.94% karena tidak adanya kegiatan yang melibatkan realisasi belanja konsumsi seperti rapat ataupun pertemuan yang melibatkan tatap muka sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN. Beban Jasa Profesi digunakan untuk membiayai narasumber sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan sebesar 80.36 % dikarenakan berkurangnya kegiatan yang melibatkan narasumber/jasa profesi akibat adanya pandemi Covid 19. Beban keperluan kantor digunakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya). Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada beban penambah daya tahan tubuh sebesar 333.06% disebabkan adanya realisasi untuk penanganan Covid 19 berupa penambahan daya tahan tubuh untuk seluruh pegawai.

Beban jasa penanganan covid 19 untuk jasa biaya penanggulangan covid 19 berupa test rapid antibodi dan swab test PCR, penyemprotan desinfektan dan belanja jasa narasumber secara online. Beban barang operasional – penanganan pandemi Covid 19 untuk pembelian hand sanitizer, masker, test kesehatan (pengadaan rapid test), desinfektan gate dan biaya telekomunikasi.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.605.895.950,00 dan Rp1.715.139.483,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	438.385.243,00	550.630.623,00	-20,38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.116.422.207,00	1.120.942.860,00	-0,40

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	51.088.500,00	43.566.000,00	17,27
<b>Jumlah</b>	<b>1.605.895.950,00</b>	<b>1.715.139.483,00</b>	<b>-6,37</b>

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman gedung. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan mesin absensi, perawatan peralatan audio system, lemari kayu, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional kendaraan bermotor, perpustakaan, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan antena dan server, pemeliharaan CCTV, pemeliharaan dispenser serta pemeliharaan penggantian kain kursi kerja

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.741.595.774,00 dan Rp8.777.426.014,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.991.701.822,00	7.400.379.098,00	-73,09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.860.000,00	268.216.000,00	-82,90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.500.000,00	177.865.000,00	-63,17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	638.533.952,00	930.965.916,00	-31,41
<b>Jumlah</b>	<b>2.741.595.774,00</b>	<b>8.777.426.014,00</b>	<b>-68,77</b>

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Pengkajian yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan pengkajian dan diseminasi maupun kegiatan yang menyangkut administrasi kegiatan mengalami



penurunan sebesar 68.77 % disebabkan adanya pengurangan dan terhentinya kegiatan untuk mengurangi dampak pandemi Covid 19

#### D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.179.781.769,00 dan Rp46.278.378.033,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.561.883.369,00	36.376.878.033,00	-95,71
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	271.500.000,00	9.786.000.000,00	-97,23
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	30.800.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	115.500.000,00	-100,00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	246.102.000,00	0,00	0,00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	69.496.400,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.179.781.769,00</b>	<b>46.278.378.033,00</b>	<b>-95,29</b>

Beban barang untuk diserahkan ke masyarakat merupakan barang sudah yang diserahkan ke masyarakat, merupakan tindak lanjut dari UJK audit BPK pada Laporan Keuangan semester II TA 2019 yaitu :

1. Beban persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat sebesar Rp246.102.000,00 terdiri dari Geomembrane senilai Rp40.766.000,00; Rumah pompa Rp16.700.000,00 dan Bak Penampungan Air Besar Rp188.636.000,00 berdasarkan BAST Nomor B-14/PL.130/H.12/01/2020 tanggal 3 Januari 2020
2. Beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp30.800.000,00 terdiri dari Pompa sentrifugal berdasarkan BAST Nomor B-14/PL.130/H.12/01/2020 tanggal 3 Januari 2020
3. Beban persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp69.496.400,00 terdiri dari jaringan air/pipanisasi pengairan Rp33.550.000,00 dan jaringan listrik 10 KVA Rp35.946.400,00 berdasarkan BAST Nomor B-14/PL.130/H.12/01/2020 tanggal 3 Januari 2020

4. Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp271.500.000,00 merupakan bantuan pembuatan kandang ayam kegiatan BEKERJA Tahun Anggaran 2019 yang sudah ditindaklanjuti dan di review Itjen di semester I Tahun 2020 (Rekapitulasi terlampir)
5. Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp1.561.883.369,00 merupakan bantuan kegiatan BEKERJA Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari pakan ternak, vitamin obat dan vaksin, lampu dan perlengkapannya, tempat pakan, tempat minum, coolbox, showcase, box kardus kandang brooder dimana fisiknya sudah tidak ada di satker Balai Besar Pengkajian tetapi sudah tersebar di masyarakat yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten banyuwangi, sudah ditindaklanjuti dan direview Itjen di Semester I Tahun 2020 (Rekapitulasi terlampir)

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.685.365.471,00 dan Rp1.898.550.798,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	407.650.485,00	399.259.467,00	2,10
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	120.253.114,00	260.548.414,00	-53,85
Beban Penyusutan Jaringan	13.701.706,00	13.701.706,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.143.760.166,00	1.225.041.211,00	-6,64
<b>Jumlah</b>	<b>1.685.365.471,00</b>	<b>1.898.550.798,00</b>	<b>-11,23</b>

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp754.600,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	184.800,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	569.800,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>754.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban penyisihan piutang tak tertagih berasal dari tuntutan ganti rugi An. Sabibal Fahri, S.Pi, M.Si akibat pengembalian pendidikan yang belum dikembalikan ke kas negara sesuai dengan hasil audit Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.0234/PW.130/G.4/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

**D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-13.771.412,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-21.527.500,00	-1.251.575.072,00	-98,28
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	154.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	37.165.090,00	980.669.210,00	-96,21
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	21.555.999,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	306.445.228,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	18.552.280,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	68.126.239,00	18.516.200,00	267,93

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
<b>Jumlah</b>	<b>562.761.337,00</b>	<b>-244.605.075,00</b>	<b>-330,07</b>

- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan berasal dari selisih harga satuan awal dan harga satuan akhir pada belanja barang persediaan sebesar Rp21.527.500,00 terdiri dari barang konsumsi Rp19.873.400,00; bahan baku Rp6.800,00 dan persediaan lainnya sebesar Rp1.647.300,00.
- Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp154.000.000,00 merupakan biaya pendidikan tugas belajar yang tidak selesai dalam batas waktu yang ditentukan An. Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si.
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan berasal dari selisih harga satuan awal dan harga satuan akhir pada belanja barang persediaan sebesar Rp37.165.090,00 terdiri dari barang konsumsi Rp37.161.340,00 dan persediaan lainnya Rp3.750,00
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp306.445.228,00 merupakan pengembalian belanja bahan Rp12.105.000; Belanja barang persediaan Rp40.022.700,00; belanja jasa profesi Rp29.240.000,00; belanja bahan pendukung lainnya Rp35.012.000,00; belanja perjalanan dinas Rp26.459.500,00; belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp163.606.028,00.
- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp18.552.280,00 merupakan pengembalian pengadaan buku perpustakaan dan pengadaan renovasi gedung B perpustakaan dan rumah genset TA 2019.
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp68.126.239 merupakan pengembalian atas kekurangan gaji Rp39,00, pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An Titim Rahmawati Rp21.000.000,00, pengembalian atas uang lembur Rp17.096.200,00, pengembalian pembayaran atas tunjangan fungsional An. Anggita Rp18.480.000,00 dan pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An. Sigid Handoko Rp11.550.0000,00

Terdapat selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp150.920.000,00 merupakan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang belum disetorkan ke Kas Negara.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.428.464.712,00 dan Rp18.727.722.380,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-23.188.447.738,00 dan Rp-83.159.148.536,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-13.196.264,00 dan Rp1.471.670.511,00.

#### E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp409.069.000,00.

#### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-13.196.264,00 dan Rp1.062.601.511,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.356.016,00
Aset Tetap Lainnya	-698.895,00
Gedung dan Bangunan	-17.853.385,00
<b>Jumlah</b>	<b>-13.196.264,00</b>

Koreksi aset tetap lainnya non revaluasi terdiri dari akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp5.356.015,00; koreksi aset tetap lainnya karena adanya

pengembalian belanja modal lainnya TAYL pada pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp698.895,00 dan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi gedung B dan pembangunan rumah genset serta biaya pengelolaan atas pekerjaan renovasi gedung B dan pembangunan rumah genset sebesar Rp17.853.385,00

#### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.066.023.648,00 dan Rp84.388.220.357,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.541.596.395,00
Diterima dari Entitas Lain	-475.572.747,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.066.023.648,00</b>

Ditagihkan ke Entitas Lain terdiri dari belanja pegawai Rp8.238.329.393,00; belanja barang Rp11.676.377.002 dan belanja modal Rp626.890.000

Diterima dari entitas lain sebesar Rp475.572.747,00 merupakan :

1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp50.994.000,00 yaitu berupa ATM BNI selama 3 tahun mulai dari 1 Nopember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020 sesuai dengan kontrak nomor BGR-01/077/PKS/2019 sebesar Rp50.994.000,00;
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp28.375.000,00 berasal dari pendapatan sewa rumah tamu (*guest house*);
3. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.080.000,00 berasal dari setoran tuntutan ganti rugi An. Sabilal Fahri sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor R.0234/PW.130/G.4/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan surat pernyataan kesanggupan akan mencicil selama 50 bulan sebesar Rp3.080.000,00 per bulan.
4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp68.126.239,00 berupa pengembalian atas kekurangan gaji Rp39,00, pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An Titim Rahmawati Rp21.000.000,00, pengembalian atas uang lembur Rp17.096.200,00, pengembalian pembayaran atas tunjangan fungsional An. Anggita Rp18.480.000,00 dan pengembalian pembayaran tunjangan fungsional An. Sigid Handoko Rp11.550.0000,00;
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp306.445.228,00 yaitu pengembalian belanja bahan Rp12.105.000; Belanja barang persediaan Rp40.022.700,00; belanja jasa profesi Rp29.240.000,00; belanja bahan pendukung lainnya Rp35.012.000,00; belanja perjalanan dinas Rp26.459.500,00; belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp163.606.028,00.

6. Penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar RP18.552.280,00 berupa pengembalian pengadaan buku perpustakaan dan pengadaan renovasi gedung B perpustakaan dan rumah genset TA 2019

#### **E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-475.572.747,00 sedangkan DKEL sebesar Rp20.541.596.395,00.

#### **E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.292.844.358,00 dan Rp21.428.464.712,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

## F.2. Pengungkapan Lain-lain

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 12 Nopember 2019 awal Balai Besar Pengkajian sebesar Rp148.834.216.000,00. Balai Besar Pengkajian telah melakukan enam kali revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi DIPA I tanggal 27 April 2020 berdasarkan terbitnya Perpres 54 tahun 2020 tentang penghematan anggaran dan SE Menteri Keuangan No. SE-6/PMK.02/2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Surat Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja K/L tahun anggaran 2020 dengan pengurangan anggaran Rp116.227.000.000,00
2. Revisi DIPA II tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan hasil Raker Komisi IV DPR tanggal 4 Mei 2020 dengan pengurangan Rp11.798.585.000,00
3. Revisi DIPA III tanggal 24 Agustus 2020 berupa revisi akun covid dan revisi POK (pemuktahiran data)
4. Revisi DIPA IV tanggal 4 September 2020 berupa revisi penambahan anggaran covid dan revisi PNPB Rp128.800.000,00
5. Revisi DIPA V tanggal 26 Oktober 2020 berupa penambahan gaji sebesar Rp81.279.000,00
6. Revisi DIPA VI tanggal 12 Nopember 2020 berupa revisi penarikan dana.

Realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid di Balai Besar Pengkajian digunakan untuk :

1. Belanja Operasional Penanganan Pandemi Covid 19 (521131) dengan jumlah anggaran Rp169.746.000,00 dan realisasi anggaran Rp169.646.980,00 digunakan untuk pembelian hand sanitizer, masker, euca roll, euca inhalant, sanitizer spray, desinfektan gate, biaya telekomunikasi pejabat struktural, dan pembelian madu, vitamin dan susu
2. Belanja Barang Persediaan – Pandemi Covid 19 (521841) dengan jumlah anggaran Rp132.313.000,00 dan realisasi anggaran Rp131.467.400,00 digunakan untuk euca roll on, euca inhalant, hand sanitizer, masker medis, desinfektan, thermogun, dan euca card
3. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192) dengan jumlah Rp415.450.000,00 dan realisasi anggaran Rp415.361.000,00 digunakan untuk test kesehatan rapid test dan swab PCR untuk seluruh pegawai; penyemprotan desinfektan dan pemberian narasumber yang pelaksanaannya dilakukan secara online.



Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2020

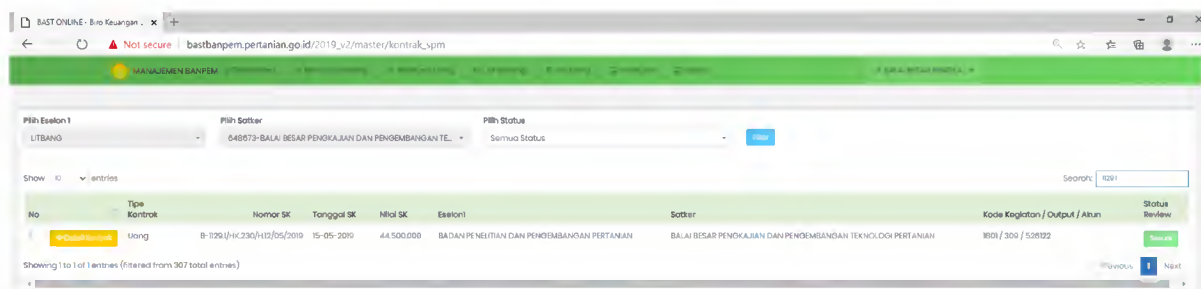
Terkait dengan penyelesaian UJK pada laporan keuangan semester II TA 2019, terlampir disampaikan bukti tindaklanjut temuan BPK terhadap belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dari aplikasi Bantuan Pemerintah Online :

No	No. SP2D	Nilai SP2D	Nama Satker	JURNAL/BANTUAN UANG	NO.PERJANJIAN/KONTRAK	NOMOR BAST
1	190231301008895	36.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	36.500.000	B.889/HK.210/H.12/05/2019	B-1450.1/PL.030/H.12/06/2019
2	190231301010883	30.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	30.500.000	B.1126/HK.230/H.12/05/2019	B-1450.1/PL.030/H.12/06/2019
3	190231301010885	44.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	44.500.000	B.1129.1/HK.230/H.12/05/2019	B-1450.2/PL.030/H.12/06/2019
4	190231301011222	24.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	24.500.000	B.1139/HK.210/H.12/05/2019	B-1546.2/PL.010/H.12/06/2019
5	190231301012377	10.000.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	10.000.000	B.904/HK.230/H.12/5/2019	B-1188.2/PL.030/H.12/05/2019
6	190231301028678	35.000.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	35.000.000	B-2920.10/HK.210/H.12/11/2019	B-3044.2/PL.010/H.12/12/2019
7	190231301031397	38.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	38.500.000	B-29677/HK.230/H.12/11/2019	B.3088.2/PL.030/H.12/12/2019
8	190231301023878	13.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	13.500.000	B-2533/HK.210/H.12/010/2019	B-2459.3/PL.010/H.12/10/2019
9	190231301023894	38.500.000	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	38.500.000	B.2382.4/HK.230/H.12/09/2019	B-2713.2/PL.030/H.12/10/2019
		271.500.000		271.500.000		

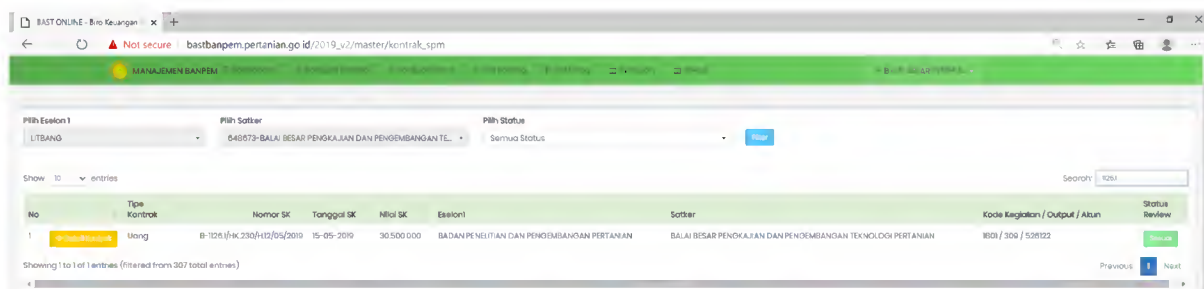
No. 1 : No SP2D :190231301008895 Nilai : Rp. 36.500.000



No. 02 : No SP2D : 190231301010883 Nilai Rp. 30.500.000



No. 3 : No. SP2D : 190231301010885 Nilai : Rp. 44.500.000



No. 04 No. SP2D : 190231301011222 Nilai : Rp. 24.500.000

The screenshot shows the BAST ONLINE interface for contract No. 04. The contract details are as follows:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B-1905.4/K.200/H.12/05/2019	12-05-2019	24.500.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 300 / 528122	Selesai

No. 5 : No. SP2D : 190231301012377 Nilai Rp. : 10.000.000

The screenshot shows the BAST ONLINE interface for contract No. 5. The contract details are as follows:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B-904/W.230/N.12/04/2019	25-04-2019	40.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 300 / 528122	Selesai

No. 6 : No SP2D : 190231301028678 Nilai : Rp. Rp. 35.000.000

The screenshot shows the BAST ONLINE interface for contract No. 6. The contract details are as follows:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B-2020.10/H.200/H.12/7/2019	20-11-2019	35.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 300 / 528122	Selesai

No. 7 : No. SP2D : 190231301023878 Nilai Rp. 13.500.000

The screenshot shows the BAST ONLINE interface for contract No. 7. The contract details are as follows:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B-2017.77/K.230/H.12/7/2019	25-11-2019	38.500.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 300 / 528122	Selesai

No. 8 : No SP2D : 190231301023878 Nilai : Rp. 13.500.000

The screenshot shows the BAST ONLINE interface for contract No. 8. The contract details are as follows:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B-2523/H.216/H.12/06/2019	19-10-2019	33.500.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 300 / 528122	Selesai

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2020

No. 9 : No. SP2D : 190231301023894 Nilai : Rp. 38.500.000

The screenshot shows a web application interface for contract management. At the top, there are filter dropdowns for 'Pilih Eselon 1' (set to 'LITBANG'), 'Pilih Satker' (set to '648573-BALAI BESAR PENKALJAN DAN PENGEMBANGAN TE...'), and 'Pilih Status' (set to 'Semua Status'). Below the filters is a table with the following data:

No	Tipe Kontrak	Nomor SK	Tanggal SK	Nilai SK	Eselon	Satker	Kode Kegiatan / Output / Akun	Status Review
1	Uang	B.2382.4/HK.230/112/09/2019	24-09-2019	38.500.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	BALAI BESAR PENKALJAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN	1801 / 209 / 52022	Success

Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 307 total entries)'. There are 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah di tindaklanjuti dan direview oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Sebagai Berikut :

No	No. SP2D	Nilai SP2D	Nama Satker	NOMOR BAST	TANGGAL	Link
1	190231302006894	40.107.619	BB Pengkajian	B-675.1/PL.010/H.12/3/2019	27/03/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620015044_6473236913.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620015044_6473236913.pdf</a>
2	190231302009619	111.600.000	BB Pengkajian	B-1122.1/PL.010/H.12/5/2019	14/05/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002117_6473145346.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002117_6473145346.pdf</a>
3	190231302011488	72.228.000	BB Pengkajian	B-1398.5/PL.010/H.H.12/6/2019	12/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190726.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190726.pdf</a>
				B-1435.2/PL.010/H.12/6/2019	17/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190798.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190798.pdf</a>
				B-1399.5/PL.010/H.H.12/6/2019	12/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190873.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473190873.pdf</a>
				B.1399.6/PL.010/H.H.12/06/2019	12/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473191352.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473191352.pdf</a>
				B-1485.1/PL.010/H.H.12/06/2019	20/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473191759.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473191759.pdf</a>
				B-1437.1/PL.010/H.H.12/06/2019	17/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473192128.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473192128.pdf</a>
				B-1438.1/PL.010/H.12/6/2019	17/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473192303.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473192303.pdf</a>
				B-1334.2/PL.010/06/2019	17/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473218315.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473218315.pdf</a>
				B-1398.5/PL.010/H.12/06/2019	12/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473243916.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473243916.pdf</a>
				B-1434/PL.010/H.12/06/2019	17/06/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473244437.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000735_6473244437.pdf</a>
4	190231302014834	22.140.000	BB Pengkajian	B-2166.5/PL.010/H.12/9/2019	02/09/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6473169170.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6473169170.pdf</a>
				B-2182.1/PL.010/H.12/9/2019	03/09/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6473169791.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6473169791.pdf</a>

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2020

No	No. SP2D	Nilai SP2D	Nama Satker	NOMOR BAST	TANGGAL	LINK
				B-2166.5/PL.010/H.12/09/2019	02/09/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6480035161.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620000316_6480035161.pdf</a>
5	190231302019730	15.840.000	BB Pengkajian	B-2542.1/PL.010/H.12/10/2019	14/10/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_4407_6473172641.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_4407_6473172641.pdf</a>
				B-2541.2/PL.010/H.12/10/2019	14/10/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_4407_6473172855.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_4407_6473172855.pdf</a>
6	190231302019743	32.966.000	BB Pengkajian	B-904.1/PL.010/H.12/4/2019	25/04/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_6473118399.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_6473118399.pdf</a>
				B-907.1/PL.010/H.12/4/2019	25/04/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_64732360231.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_64732360231.pdf</a>
				B-674.1/PL.010/H.12/03/2019	27/03/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_64732726621.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620003954_64732726621.pdf</a>
7	190231302015181	530.201.750	BB Pengkajian	B-2119.1/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473113873.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473113873.pdf</a>
				B-2118.1/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473122346.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473122346.pdf</a>
				B-2121.1/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473122795.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473122795.pdf</a>
				B-2122.2/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473228196.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473228196.pdf</a>
				B-2120.1/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473262474.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473262474.pdf</a>
				B-2070.6/PL.010/H.12/08/2019/	21/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473263715.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473263715.pdf</a>
				B-2122.1/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473267235.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473267235.pdf</a>
				B-2123.1/PL.010/H.12/08/2019	21/08/2019	<a href="http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473267303.pdf">http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620009408_6473267303.pdf</a>
8	190231301019202	628.800.000	BB Pengkajian	B-1914.6/PL.010/H.12/8/2019	03/08/2019	<a href="http://webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175932799.pdf">webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175932799.pdf</a>
No	No. SP2D	Nilai SP2D	Nama Satker	NOMOR BAST	TANGGAL	LINK

				B-2056.4/PL.030/H.12/08/2019	22/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f1631759147931.pdf
				B-2071.2/PL.030/H.12/08/2019	22/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175965170.pdf
				B-2072.3/PL.030/H.12/08/2019	22/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175963596.pdf
				B-2123.3/PL.030/H.12/08/2019	29/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175957914.pdf
				B-2077.2/PL.030/H.12/08/2019	22/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002715_6473051617.pdf
				B-1914.4/PL.010/H.12/8/2019	03/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f1631759888692.pdf
				B-1917.4/PL.010/H.12/8/2019	03/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f163175966051.pdf
				B-1914.2/PL.010/H.12/8/2019	03/08/2019	webfile/6950c16c9bcc6995f376b297f1631759145982.pdf
				B-2121.2/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002715_6473115704.pdf
				B-1969.2/PL.010/H.12/08/2019	10/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002715_6473256529.pdf
				B-2054.5/PL.010/H.12/08/2019	21/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002715_6480036259.pdf
9	190231302014240	108.000.000	BB Pengkajian	B-2118.4/PL.010/H.12/8/2019	29/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002401_6473189883.pdf
				B-2124.2/PL.010/H.12/8/2019	29/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002401_6473189927.pdf
				B-2122.3/PL.010/H.12/08/2019	29/08/2019	http://bastbanpem.pertanian.go.id/2019_v2/webfile/BAST_6620002401_6473203740.pdf

